

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan pengolahan data, analisis, serta pembahasan yang telah dipaparkan dari penelitian tentang “Determinan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan *R-Square* untuk rasio efektivitas PAD sebesar 0.0062, untuk rasio efisiensi sebesar 0.0943, untuk rasio kemandirian sebesar 0.0196, lalu pada rasio aktivitas belanja operasi sebesar 0.5738, selanjutnya rasio aktivitas belanja modal sebesar 0.1786, dan rasio pertumbuhan menunjukkan *R-Square* sebesar 0.0045.
2. Hasil pengujian pada hipotesis pertama menyimpulkan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio aktivitas belanja modal, dan rasio pertumbuhan dengan arah positif dari hasil pengujian. Tetapi ukuran (*size*) pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian, dan rasio aktivitas belanja modal dengan menyimpulkan arah positif dari hasil pengujian. Hasil tersebut menjelaskan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah dapat dijadikan tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian dan aktivitas belanja operasi.
3. Hasil pengujian pada hipotesis kedua menyimpulkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efektivitas PAD serta rasio aktivitas belanja operasi. Sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan

4. rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas belanja modal, dan rasio pertumbuhan. Hasil tersebut menjelaskan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak dapat dijadikan tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga menyimpulkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efektivitas PAD serta rasio efisiensi. Tetapi belanja daerah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan. Lalu dinyatakan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio aktivitas dengan menyimpulkan arah negatif dari hasil pengujian. Hasil tersebut menjelaskan bahwa belanja daerah belum sepenuhnya dapat dijadikan tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Hasil pengujian pada hipotesis keempat menyimpulkan bahwa temuan audit BPK memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, serta rasio pertumbuhan. Sedangkan temuan audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio belanja modal artinya bertolak belakang dengan hipotesis penelitian. Tetapi temuan audit BPK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio aktivitas belanja operasi. Hasil tersebut menjelaskan bahwa temuan audit BPK secara keseluruhan belum mampu dijadikan tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah namun berdasarkan proksi pengukuran kinerja keuangan tertentu temuan audit BPK mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat digunakan di kemudian hari, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi inspektorat dan perangkat daerah, praktisi di bidang sektor publik, untuk lebih dapat memperhatikan pengelolaan kinerja keuangan pada pemerintah daerahnya. Agar setiap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan bisa dimanfaatkan sesuai target kepemilikan pemerintahan, guna meningkatkan aspek – aspek dalam kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi praktisi – praktisi yang berada di sektor publik, untuk lebih dapat memperhatikan mekanisme kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tujuan pencapaian kinerja yang baik. Selain itu dapat memperhatikan pengelolaan keuangan yang memiliki dampak dalam setiap keputusan yang diambil terutama terhadap pengelolaan konflik *principal* dan *agent*.
- c. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, sebaiknya mengembangkan penelitian dengan menggunakan faktor – faktor lain yang juga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti tingkat kekayaan daerah, ukuran legislatif, serta opini audit yang telah peneliti jelaskan pada tinjauan pustaka. Pengembangan penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan proksi yang berbeda, entitas pemerintahan lainnya, dan periode sampel penelitian pada rentang waktu yang berbeda untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.